



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 58/SEK/KU.04.2/02/2017
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Set
Hal : Perpanjangan Waktu Penyerahan Dokumen

16 Februari 2017

Yth.

Ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan RI
di Jakarta

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi antara Mahkamah Agung dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tanggal 13 Februari 2017 di Ruang Rapat Biro Keuangan BUA MA, dan berdasarkan hasil penyerahan dokumen terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pendaftaran biaya perkara, hak redaksi, sisa panjar perkara dan PNBP Lainnya yang berasal dari pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding belum dapat dipenuhi secara lengkap kepada Tim BPK hingga tanggal 14 Februari 2017 sebagaimana Surat Ketua Tim BPK RI Nomor 03/LK-MA/02/2017 tanggal 2 Februari 2017 (terlampir), dengan ini kami mengajukan perpanjangan waktu penyerahan dokumen tersebut sampai dengan 24 Februari 2017.

Permohonan sebagaimana pokok surat merupakan upaya Mahkamah Agung RI untuk mendukung pemeriksaan secara komprehensif, guna mewujudkan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2016 yang berkualitas dan handal bebas dari kekurangan penyajian yang material.

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

A.S. PUDJOHARSOYO

Tembusan:

1. Panitera Mahkamah Agung RI
2. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung RI
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
5. Penanggung Jawab BPK RI
6. Pengendali Teknis BPK RI
7. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat 10210, Telepon 021-25549000 Ekstensi 3562 Faksimile 021-5700501

Jakarta, 2 Februari 2017

Nomor : 03/LK-MA/02/2017
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permintaan Dokumen

Yth,
Sekretaris Mahkamah Agung
di Jakarta

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2016 pada Mahkamah Agung sesuai Surat Tugas No. 9/ST/V/01/2017 tanggal 20 Januari 2017, kami membutuhkan dokumen terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pendaftaran biaya perkara, hak redaksi, sisa panjar biaya perkara, dan PNBP lainnya pada pengadilan tingkat pertama (PN, PA, PTUN, dan PT TUN Jakarta) dan pengadilan tingkat banding (PT, PTA, dan PT TUN) yang berada di bawah Mahkamah Agung.

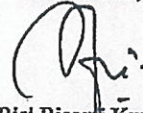
Dokumen yang kami butuhkan antara lain:

1. Laporan keadaan perkara Tahun 2015 dan 2016 (sesuai contoh tabel pada Lampiran 1).
2. Total perkara yang didaftarkan di pengadilan tingkat pertama (gugatan, permohonan, eksekusi, banding, kasasi, peninjauan kembali) tahun 2015, namun biaya pendaftarannya disetorkan ke kas negara pada tahun 2016 (sesuai contoh tabel pada Lampiran 2).
3. Total perkara yang didaftarkan di pengadilan tingkat pertama (gugatan, permohonan, eksekusi, banding, kasasi, peninjauan kembali) tahun 2016, namun biaya pendaftarannya belum disetor/disetorkan ke kas negara pada tahun 2017 (sesuai contoh tabel pada Lampiran 3).
4. Total perkara yang putus di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tahun 2015, namun hak redaksinya disetorkan ke kas negara tahun 2016 (sesuai contoh tabel pada Lampiran 4).
5. Total perkara yang putus di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tahun 2016, namun hak redaksinya disetorkan ke kas negara tahun 2017 (sesuai contoh tabel pada Lampiran 5).
6. Rekapitulasi perkara di pengadilan tingkat pertama yang sisa panjar biaya perkaranya belum dikembalikan kepada pihak yang berperkara/belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2016 (sesuai contoh tabel pada Lampiran 6).
7. Total perkara eksekusi sampai dengan 31 Desember 2016 yang belum diperhitungkan sisa panjar biaya perkaranya dan belum dikembalikan ke pihak berperkara/ke kas negara (sesuai contoh tabel pada Lampiran 7).
8. PNBP lainnya di pengadilan tingkat pertama tahun 2015, namun disetorkan ke kas negara pada tahun 2016 (sesuai contoh tabel pada Lampiran 8).
9. PNBP lainnya di pengadilan tingkat pertama tahun 2016, namun disetorkan ke kas negara pada tahun 2017 (sesuai contoh tabel pada Lampiran 9).

Dokumen tersebut dapat dikirimkan melalui surel ke rici.kurnia@bpk.go.id dan rosalia@bpk.go.id (081330491887) dengan tembusan ke Mahkamah Agung cq. Biro Keuangan. Mengingat pentingnya dokumen tersebut dan keterbatasan waktu pemeriksaan, kami harapkan dokumen tersebut dapat kami terima paling lambat hari Selasa tanggal 14 Februari 2017.

Demikianlah pemberitahuan kami. Atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Ketua Tim,



Rici Ricarri Kurnia
NIP 19800613 200312 1 001

Tembusan Yth.:

1. Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
2. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
3. Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung
4. Badan Pengawasan Mahkamah Agung
5. Pcnanggung Jawab
6. Pengendali Teknis

LAPORAN KEADAAN PERKARA TAHUN 2015 DAN 2016

Pengadilan Tingkat Pertama

No	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
A	2015				
1	Perdata Gugatan Tingkat Pertama (termasuk PHI dan Niaga)				
2	Perdata Permohonan Tingkat Pertama				
3	Eksekusi				
4	Perdata Tingkat Banding				
5	Perdata Tingkat Kasasi				
6	Perdata Tingkat Peninjauan Kembali				
B	2016				
1	Perdata Gugatan Tingkat Pertama (termasuk PHI dan Niaga)				
2	Perdata Permohonan Tingkat Pertama				
3	Eksekusi				
4	Perdata Tingkat Banding				
5	Perdata Tingkat Kasasi				
6	Perdata Tingkat Peninjauan Kembali				

Pengadilan Tingkat Banding

No	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
A	2015				
1	Perdata Tingkat Banding				
B	2016				
1	Perdata Tingkat Banding				

Jakarta, Februari 2017
Ketua PN/PA/PTUN/PT/PTA/PT TUN

NIP.

DAFTAR PERKARA TAHUN 2015 YANG BIAYA PENDAFTARANNYA DISETORKAN KE KAS NEGARA TAHUN 2016

No.	Uraian	Jumlah Perkara yang Didaftarkan Tahun 2015	Tarif PNBP Biaya Pendaftaran (Rp)	Jumlah PNBP Biaya Pendaftaran (Rp)	Jumlah PNBP yang telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2015 (Rp)	Sisa PNBP yang Belum Disetor ke Kas Negara Tahun 2015 (Rp)	Sisa PNBP yang telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2016 (Rp)
1	2	3	4	5=(3x4)	6	7=(5-6)	8
1	Perdata Gugatan Tingkat Pertama (termasuk PHI dan Niaga)						
2	Perdata Permohonan Tingkat Pertama						
3	Eksekusi						
4	Perdata Tingkat Banding						
5	Perdata Tingkat Kasasi						
6	Perdata Tingkat Peninjauan Kembali						
	Jumlah						

Jakarta, Februari 2017
Ketua PN/PA/PTUN/PT/PTA/PT TUN

.....
NIP.

DAFTAR PERKARA TAHUN 2016 YANG BIAYA PENDAFTARANNYA DISETORKAN KE KAS NEGARA TAHUN 2017

No.	Uraian	Jumlah Perkara yang Didaftarkan Tahun 2016	Tarif PNBP Biaya Pendaftaran (Rp)	Jumlah PNBP Biaya Pendaftaran (Rp)	Jumlah PNBP yang telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2016 (Rp)	Sisa PNBP yang Belum Disetor ke Kas Negara Tahun 2016 (Rp)	Sisa PNBP yang telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2017 (Rp)
1.	2	3	4	5=(3x4)	6	7=(5-6)	8
1	Perdata Gugatan Tingkat Pertama (termasuk PHI dan Niaga)						
2	Perdata Permohonan Tingkat Pertama						
3	Eksekusi						
4	Perdata Tingkat Banding						
5	Perdata Tingkat Kasasi						
6	Perdata Tingkat Peninjauan Kembali						
	Jumlah						

Jakarta, Februari 2017
Ketua PN/PA/PTUN/PT/PTA/PT TUN

NIP.

DAFTAR PERKARA PUTUS TAHUN 2015 YANG HAK REDAKSINYA DISETORKAN KE KAS NEGARA TAHUN 2016

No.	Uraian	Jumlah Perkara yang Putus Tahun 2015	Tarif PNBP Hak Redaksi (Rp)	Jumlah PNBP Hak Redaksi (Rp)	Jumlah PNBP yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2015 (Rp)	Sisa PNBP yang Belum Disetor ke Kas Negara Tahun 2015 (Rp)	Sisa PNBP yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2016 (Rp)
1	2	3	4	5=(3x4)	6	7=(5-6)	8
1	Perdata Gugatan Tingkat Pertama (termasuk PHI dan Niaga)						
2	Perdata Permohonan Tingkat Pertama						
	Jumlah						

No.	Uraian	Jumlah Perkara yang Didaftarkan Tahun 2015	Tarif PNBP Hak Redaksi (Rp)	Jumlah PNBP Biaya Pendaftaran (Rp)	Jumlah PNBP yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2015 (Rp)	Sisa PNBP yang Belum Disetor ke Kas Negara Tahun 2015 (Rp)	Sisa PNBP yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2016 (Rp)
1	2	3	4	5=(3x4)	6	7=(5-6)	8
1	Perdata Tingkat Banding						
	Jumlah						

Jakarta, Februari 2017
Ketua PN/PA/PTUN/PT/PTA/PT TUN

NIP.

DAFTAR PERKARA PUTUS TAHUN 2016 YANG HAK REDAKSINYA DISETORKAN KE KAS NEGARA TAHUN 2017

No.	Uraian	Jumlah Perkara yang Putus Tahun 2016	Tarif PNBP Hak Redaksi (Rp)	Jumlah PNBP Hak Redaksi (Rp)	Jumlah PNBP yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2016 (Rp)	Sisa PNBP yang Belum Disetor ke Kas Negara Tahun 2016 (Rp)	Sisa PNBP yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2017 (Rp)
1	2	3	4	5=(3x4)	6	7=(5-6)	8
1	Perdata Gugatan Tingkat Pertama (termasuk PHI dan Niaga)						
2	Perdata Permohonan Tingkat Pertama						
	Jumlah						

No.	Uraian	Jumlah Perkara yang Didaftarkan Tahun 2016	Tarif PNBP Hak Redaksi (Rp)	Jumlah PNBP Biaya Pendaftaran (Rp)	Jumlah PNBP yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2016 (Rp)	Sisa PNBP yang Belum Disetor ke Kas Negara Tahun 2016 (Rp)	Sisa PNBP yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2017 (Rp)
1	2	3	4	5=(3x4)	6	7=(5-6)	8
1	Perdata Tingkat Banding						
	Jumlah						

Jakarta, Februari 2017
Ketua PN/PA/PTUN/PT/PTA/PT TUN

.....
NIP.

[illegible]

Jakarta, Februari 2017
Ketua PN/PA/PTUN

NIP.

**DAFTAR PERKARA EKSEKUSI YANG BELUM DIPERHITUNGKAN SISA PANJAR BIAYANYA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016**

[illegible]

Jakarta, Februari 2017
Ketua PN/PA/PTUN

NIP.

PNBP LAINNYA YANG DITERIMA DI TAHUN 2015 NAMUN DISETORKAN KE KAS NEGARA TAHUN 2016

No.	Jenis PNBP	Tarif PNBP (Rp)	Jumlah PNBP yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2015 (Rp)	Jumlah PNBP Lainnya yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2015 (Rp)	Sisa PNBP Lainnya yang Belum Disetor ke Kas Negara Tahun 2015 (Rp)	Sisa PNBP Lainnya yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2016 (Rp)
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7
1						
2						
3						
4						
	Jumlah					

Jakarta, Februari 2017
Ketua PN/PA/PTUN

.....
NIP.

PNBP LAINNYA YANG DITERIMA DI TAHUN 2016 NAMUN DISETORKAN KE KAS NEGARA TAHUN 2017

No.	Jenis PNBP	Tarif PNBP (Rp)	Jumlah PNBP yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2016 (Rp)	Jumlah PNBP Lainnya yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2016 (Rp)	Sisa PNBP Lainnya yang Belum Disetor ke Kas Negara Tahun 2016 (Rp)	Sisa PNBP Lainnya yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2017 (Rp)
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7
1						
2						
3						
4						
	Jumlah					

Jakarta, Februari 2017
Ketua PN/PA/PTUN

.....
NIP.